BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indo-Pasifik adalah suatu konsep yang sebenarnya mempunyai sejarah panjang dan dapat dilacak dari konseptualisasi oleh seorang politikus ahli geografis asal Jerman bernama *Karl Haushofer*. *Karl Haushofer* melakukan ekspedisi kerumu beberapa negara di Asia seperti India, Hong Kong, Jepang, dan dari hasil ekspedisi tersebut, *Haushofer* memperkenalkan suatu istilah yang dinamakan *Indopazifischen Raum* atau ruang Indo-Pasifik (Sundararaman, 2023). Istilah Indo-Pasifik baru mengalami peningkatan popularitas pada abad ke-21 melalui pidato perdana menteri Jepang Shinzo Abe yang saat itu disampaikan pada bulan Agustus 2016 di Nairobi. Perdana Menteri Shinzo Abe menegaskan bahwa wilayah biotstrategis setingkat Indo-Pasifik memerlukan suatu strategi bernama *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) untuk melindungi kepentingan maritim yang membentang dari Samudera Hindia dan Pasifik Barat. Kepentingan maritim tersebut sebagian besar diakibatkan oleh hubungan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang dinamis sebagai lautan yang memajukan kebebasan dan kemakmuran sehingga mendobrak batas – batas geografis yang kini mempunyai bentuk berbeda yaitu *broader Asia* atau Asia yang lebih luas (Yadav, 2022). Oleh karena itu, konsepsi wilayah Indo-Pasifik telah mengalami perkembangan yang

pesat sehingga perlu untuk memahami Indo-Pasifik dari beberapa perspektif yaitu geografis, geopolitik, dan geoekonomi.

Secara geografis, wilayah Indo-Pasifik mencakup Samudra Hindia, Samudra Pasifik serta wilayah perairan di sekitar Indonesia dan Filipina yang menghubungkan Asia dan Australia. Wilayah ini meliputi negara-negara seperti Indonesia, India, Jepang, China, Korea Selatan, Australia, dan sejumlah negara kepulauan di Pasifik. Negara-negara besar seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan India berkontribusi besar terhadap nilai strategis wilayah karena kekuatan ekonomi dan militernya. Secara geoekonomi, Samudra Hindia menjadi jalur penting yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Asia-Pasifik, serta menyokong 62% PDB dunia dan hampir 50% perdagangan global (Jochheim & Lobo, 2023; Yadav, 2022). Multilateralisme pun dibutuhkan untuk menata kerja sama ekonomi, jasa, dan tenaga kerja antarnegara. Secara geopolitik, kebangkitan China sebagai kekuatan global mendorong pembentukan aliansi regional untuk menyeimbangkan pengaruhnya (Pelaggi & Termine, 2023). Meski digambarkan sebagai konstruksi geopolitik dan ekonomi yang mencakup konektivitas ruang maritim antara Samudera Pasifik dan Hindia, belum ada definisi yang menyepakati bahwa Indo-Pasifik merupakan wilayah *super-region*.

Indonesia mulai mempromosikan konsep Indo-Pasifik melalui pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada tahun 2018; bahwa Indonesia memprioritaskan terciptanya kesejahteraan, stabilitas, dan perdamaian di wilayah Indo-Pasifik serta berkontribusi memajukan kerjasama yang solid dengan ASEAN. Hal ini selaras dengan pandangan Presiden Jokowi dalam KTT Asia Timur ke-13 pada bulan

November 2018; bahwa persaingan di wilayah Indo-Pasifik harus diminimalisir dan kolaborasi maritim harus ditingkatkan (Yadav, 2022). Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia telah mendirikan kebijakan poros maritim global *Global Maritime Fulcrum (GMF)* untuk menguatkan kepentingan Indonesia dalam menghadapi dinamika wilayah Indo-Pasifik. Pada pertemuan *East Asia Summit (EAS)* November 2014, Presiden Jokowi mengemukakan tujuan dibentuknya kebijakan GMF, yaitu membangun budaya maritim, memperkuat kedaulatan pangan maritim, meningkatkan diplomasi dengan negara maritim lainnya, mendorong perekonomian maritim Indonesia melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan, dan memperkuat pertahanan dan keamanan maritim untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Nampak jelas bahwa kelima tujuan GMF tersebut merupakan langkah strategis Indonesia memposisikan peran geopolitiknya sebagai salah satu kekuatan penjaga Samudera Pasifik dan Hindia yang mempunyai interkoneksi global (Yadav, 2022). Secara keseluruhan, kebijakan poros maritim global Indonesia yang digunakan untuk mempromosikan multilateralisme telah sesuai dengan asas Politik Bebas Aktif sehingga dapat disandingkan dengan kebijakan luar negeri lainnya seperti Jepang *Free and Open Indo-Pacific (FOIP)*, India dengan *Look East Policy*, visi Australia *Outward Looking*, dan visi Amerika Serikat *US Indo-Pacific Strategy*.

Indonesia sebagai the founding fathers of ASEAN telah mengadopsi suatu dokumen bernama ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik (AOIP). Salah satu elemen kunci dari AOIP adalah memandang Samudra Hindia dan Pasifik sebagai wilayah maritim yang terintegrasi dan erat hubungannya dengan peran strategis ASEAN

(Haruko, 2020). Menurut dokumen resmi AOIP, tujuan ASEAN dan Indonesia adalah menciptakan lingkungan yang mendukung stabilitas, perdamaian, kerja sama multilateralisme, dan mempromosikan kerja sama ekonomi wilayah Indo-Pasifik untuk meningkatkan kepercayaan antar negara dan meningkatkan proses pembangunan komunitas ASEAN. Pembangunan komunitas ASEAN dioptimalisasi melalui beberapa mekanisme seperti *ASEAN Defence Minister Ministers Meeting Plus*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *East Asia Summit (EAS)*, dan mekanisme *ASEAN plus One* lainnya yang relevan dengan kerjasama maritim, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan (ASEAN, 2021). Hal ini selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif sehingga memperbesar peluang Indonesia untuk mengoptimalkan hubungan diplomatik dengan aktor luar ASEAN seperti negara - negara di Afrika.

Dari segi historis, Indonesia dan kontinen Afrika telah menjalin kemitraan sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) menghasilkan Deklarasi Bandung tahun 1955 untuk membentuk kesepakatan dalam memperkuat solidaritas Asia-Afrika, kerja sama ekonomi dan budaya, dan menegaskan keinginan untuk tidak berpihak pada blok Barat maupun Timur pada masa Perang Dingin yang disebut sebagai gerakan non-Blok. Cikal-bakal Konferensi Asia Afrika kemudian berkembang menjadi *Indonesia Africa Forum (IAF)* yang dibentuk di Bali tahun 2018 untuk memprioritaskan kebijakan luar negeri yang sebagian besar direalisasikan melalui diplomasi ekonomi (Dorigne-Thomson, 2022). Potensi kekayaan sumber daya alam Afrika meliputi cadangan bahan bakar fosil, bijih logam dan permata. Hal ini turut meningkatkan nilai manufaktur dan industrialisasi di Afrika sebanyak 3.5% per tahunnya dari tahun 2005 hingga 2016 atau

senilai \$75 miliar di tahun 2005 meningkat hingga \$130 miliar di tahun 2016 serta meningkatkan *Foreign Direct Investment* (FDI) senilai 22% pada tahun 2015 (Signe, 2018). Agrikultur juga berkontribusi terhadap perekonomian di beberapa negara Afrika sampai pada titik dimana sektor agrikultur menjadi penggerak ekonomi paling utama (Mabogunje, 2024). Terdapat 55 negara di Afrika dan salah satu negara yang menjadi fokus penelitian ini adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan dipilih karena mempunyai hubungan diplomatik dan merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Afrika Selatan dimulai pada tanggal 12 Agustus 1994 yang berdasarkan pada komitmen kedua negara untuk mengikuti atau menganut gerakan Non-Blok (*Non-Aligned Movement*). Indonesia telah menganut gerakan non-Blok ketika Konferensi Asia-Afrika meresmikan Deklarasi Bandung tahun 1955, namun Afrika Selatan saat itu belum menjadi bagian dari gerakan tersebut serta tidak menghadiri KAA karena Afrika Selatan masih berada dibawah pemerintahan apartheid. Afrika Selatan baru menjadi anggota penuh Gerakan Non-Blok setelah mendirikan konstitusi baru yang membebaskan Afrika Selatan dari politik Apartheid dan memilih Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama secara demokratis. Hal ini kemudian berdampak pada perkembangan hubungan bilateral yang semakin solid karena adanya persamaan visi politik luar negeri khususnya terhadap Indo-Pasifik dalam meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan wilayah. Afrika Selatan juga memandang Indo-Pasifik sebagai wilayah yang dapat meningkatkan perdamaian, kerja sama inklusif, keamanan, dan pembangunan sosial ekonomi. Dalam sektor perdagangan, Indonesia dan Afrika saling membutuhkan dalam komoditas

produk impor dan ekspor meliputi batubara, minyak sawit, gas alam, emas, platinum, bijih besi, kendaraan bermotor, dan produk agrikultur.

Pandangan Afrika Selatan terhadap Indo-Pasifik terbentuk dari pilar – pilar kebijakan luar negerinya yang mencakup kemajuan agenda Afrika, integrasi ekonomi regional Indo-Pasifik, kerjasama Selatan-Selatan, dan multilateralisme (Department of International Relations and Cooperation, 2022). Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya IORA (*Indian Ocean Rim Association*) yang didirikan oleh Presiden Nelson Mandela berdasarkan konsep *Indian Ocean Rim Community* yang memiliki 23 negara utama serta 10 mitra dialog. IORA kemudian mengesahkan *Outlook on the Indo-Pacific* pada pertemuan COM bulan November 2022 sebagai *platform* untuk mengakomodir peningkatan kerjasama antar negara – negara wilayah Indo-Pasifik terhadap beberapa fokus prioritas IORA (Pandey, 2023). Afrika Selatan juga merupakan anggota sekaligus pendiri komunitas Internasional bernama *Southern African Development Community* (SADC). Dilansir oleh Kementerian luar negeri Afrika Selatan, SADC adalah organisasi intra-pemerintah yang beranggotakan 15 negara Afrika bagian Selatan termasuk Afrika Selatan untuk memajukan kerja sama dan integrasi ekonomi sosial di sektor lingkungan, pertambangan, energi, pertanian, dan sumber daya manusia. Kerja sama ekonomi sosial yang difokuskan dalam SADC dapat menjadi pedoman untuk memahami perkembangan kerja sama ekonomi atau perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, yaitu:

1.2 Rumusan Masalah

- Seperti apa bentuk relasi interdependen antara Indonesia dengan Afrika Selatan dalam konteks Indo-Pasifik?
- Seperti apa kerangka kemitraan Indonesia dengan Afrika Selatan dalam konteks Indo-Pasifik?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang telah diberikan, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kepentingan politik luar negeri Indonesia dan Afrika Selatan berperan terhadap stabilitas dan kerjasama di wilayah Indo-Pasifik serta menganalisis apa dampak yang ditimbulkan dalam hubungan diplomasi dan ekonomi yang terjalin antara Indonesia dan Afrika Selatan terhadap dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Hubungan ekonomi dapat ditelusuri melalui sektor perdagangan bilateral yang telah disepakati dalam beberapa MoU atau perjanjian. Perdagangan hasil sumber daya alam berpotensi memajukan Indonesia dan Afrika Selatan sebagai sesama negara kekuatan menengah dan penganut gerakan non-blok dalam menjalin hubungan diplomasi yang ditujukan untuk menjaga keamanan dalam perdagangan.

Selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi seperti apa kerangka kemitraan Indonesia dengan Afrika Selatan yang menggambarkan kepemimpinan regional kedua negara ini sehingga terbentuk interaksi yang saling membutuhkan satu sama lain. Kerangka kemitraan Indonesia dan Afrika Selatan akan dianalisis melalui perannya

masing – masing di beberapa organisasi atau institusi internasional. Indonesia sebagai anggota IORA, dan pernah memegang kursi kepresidenan ASEAN sementara Afrika Selatan sebagai anggota, IORA, Africa Union (AU), dan sebagai pemimpin *Southern African Development Community* (SADC).

1.4 Signifikansi Penelitian

Konsep Indo-Pasifik diformulasikan tidak hanya untuk mendefinisikan ulang wilayah geografis yang melampaui ruang lingkup samudera Pasifik dan Hindia, tetapi juga sebagai upaya menyeimbangkan kembali kekuatan demi mencegah satu kekuatan mendominasi kekuatan lainnya. Hal ini mengakibatkan kajian Indo-Pasifik lebih banyak terfokus pada kepentingan dan kebijakan apa yang ditempuh oleh negara – negara seperti Amerika Serikat, Jepang, India, Australia, China, dan Uni Eropa ketimbang berfokus pada kebijakan negara yang berada di tengah. Selain itu, tidak banyak kajian yang membahas konteks Indo-Pasifik dari perspektif kekuatan yang berada di benua Afrika. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai nilai signifikansi dalam menjelaskan dinamika Indo-Pasifik dari penggabungan para aktor negara yang tidak lazim atau jarang dibahas sebelumnya sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang pengaruh hubungan bilateral atau multilateral Indonesia dan Afrika Selatan di wilayah Indo-Pasifik.

Penelitian ini juga memberi perspektif baru mengenai studi wilayah Indo-Pasifik kepada para akademisi, pemangku kebijakan, pengamat atau tokoh politik, dan masyarakat luas. Akademisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman untuk

menambah wawasan mengenai hubungan interdependensi antara Indonesia dan Afrika Selatan dan mengembangkan kajian Indo-Pasifik lebih luas. Para pemangku kebijakan dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan akademis untuk memaksimalkan peran Indonesia sebagai kekuatan menengah di Indo-Pasifik dan memperkuat hubungan diplomatik di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Pembaca umum dari kalangan masyarakat serta mahasiswa dapat memanfaatkan nilai signifikansi penelitian ini sebagai wawasan untuk memahami peran Indonesia dan Afrika Selatan dalam arsitektur regional Indo-Pasifik.

Secara keseluruhan, Bab I Pendahuluan memberikan gambaran umum tentang hubungan interdependensi Indonesia dan Afrika Selatan dalam arsitektur regional Indo-Pasifik yang diawali dengan definisi umum dari Indo-Pasifik, negara – negara yang terlibat di dalamnya, bagaimana Indonesia mempromosikan kebijakan luar negerinya yang berkaitan dengan Indo-Pasifik, dan perkembangan hubungan diplomatik Indonesia dengan Afrika Selatan.

Rumusan masalah diciptakan untuk menjawab permasalahan yang akan ditelusuri dalam tesis ini. Selanjutnya adalah Bab II Kerangka Berpikir yang akan memaparkan beberapa konsep dan teori yang akan menjadi landasan teoritis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Indo-Pasifik secara akurat.